



**SALINAN**

GOVERNOR NORTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR NORTH SUMATRA  
NUMBER 23 YEAR 2018

ABOUT

CLASSIFICATION OF GOVERNMENT  
NORTH SUMATRA PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR NORTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) menyatakan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu mengatur klasifikasi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32).
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Klasifikasi Arsip adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
11. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
12. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi suatu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
13. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan nya Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman penyusunan arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

## POLA KLASIFIKASI ARSIP

### Pasal 3

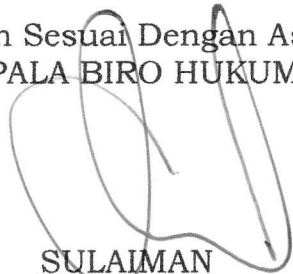
- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan seluruh OPD.
- (2) Sepuluh pokok masalah yang menampung seluruh fungsi dan kegiatan seluruh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. 000 Umum;
  - b. 100 Pemerintahan;
  - c. 200 Politik;
  - d. 300 Keamanan/Ketertiban;
  - e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
  - f. 500 Perekonomian;
  - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
  - h. 700 Pengawasan;
  - i. 800 Kepegawaian; dan
  - j. 900 Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PENUTUP Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

TENGKU ERRY NURADI

diundangkan di Medan  
pada tanggal 7 Juni 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 23



LAMPIRAN    PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR    23 TAHUN 2018  
TANGGAL 6 Juni 2018

POLA KLASIFIKASI ARSIP  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A.    BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI ARSIP

1. Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua OPD yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara *DECIMAL*, dengan mempergunakan *TIGA ANGKA DASAR*, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama OPD.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 (Tiga) perincian dasar, masing-masing perincian kesatu, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas OPD sebagai berikut :
  - a. 000        Umum
  - b. 100        Pemerintahan
  - c. 200        Politik
  - d. 300        Keamanan dan Ketertiban
  - e. 400        Kesejahteraan
  - f. 500        Perekonomian
  - g. 600        Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
  - h. 700        Pengawasan
  - i. 800        Kepegawaian
  - j. 900        Keuangan

5. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- a. 01 Perencanaan
- b. 02 Penelitian
- c. 03 Pendidikan
- d. 04 Laporan
- e. 05 Panitia
- f. 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- g. 07 Statistik
- h. 08 Peraturan perundang-undangan
- i. 09 .....

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama OPD/UPTD sebagai berikut :

a	Sekretariat Daerah	Setdaprov
b	Asisten Pemerintahan	As.Pem
c	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan	As. PPK
d	Asisten Administrasi Umum dan Asset	As.Mum dan Aset
e	Biro Administrasi Pembangunan	Biro Adpem
f	Biro Bina Perekonomian	Biro Perekonomian
g	Biro Hukum	Biro Hukum
h	Biro Humas dan Keprotokolan	Biro Humas
i	Biro Organisasi	Biro Organisasi
j	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Biro Otda & KS
k	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan
l	Biro Sosial dan Kesejahteraan	Biro Sosial
m	Biro Umum dan Perlengkapan	Biro Umum
n	Sekretariat DPRD	Set DPRD
o	Inspektorat	Inspektorat
p	Badan Kepegawai an Daerah	BKD
q	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
r	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
s	Badan Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
t	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
u	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD
v	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM

w	Badan Penghubung Daerah Provinsi	Badan Penghubung
x	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
y	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Dis Bina Marga
z	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dis ESDM
aa	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dis Budpar
bb	Dinas Kehutanan	Dis Hut
cc	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dis KP
dd	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dis Dukcapil
ee	Dinas Kesehatan	Dis Kes
ff	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dis Hanpang dan Ternak
gg	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dis Kominfo
hh	Dinas Koperasi dan UKM	Dis KUKM
ii	Dinas Lingkungan Hidup	Dis LH
jj	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dis PMD
kk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dis PP dan PA
ll	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dis Pora
mm	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dis PM PPTSP
nn	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Dis PP dan KB
oo	Dinas Perhubungan	Dis Hub
pp	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dis Perindag
qq	Dinas Perkebunan	Dis Bun
rr	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dis Perpus dan Arsip
ss	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dis PKP
tt	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dis SDA CK TR
uu	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dis TP dan HT
vv	Dinas Tenaga Kerja	Dis Naker
ww	Dinas Pendidikan	Dis Dik
xx	Dinas Sosial	Dis Sosial
yy	Satuan Polisi Pamong Praja	Sat Pol PP

7. Kode Wilayah adalah kode untuk menunjukkan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip desimal, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut :

- a. 10Pemerintah Kota Medan
- b. 11Pemerintah Kota Binjai
- c. 12Pemerintah Kabupaten Langkat
- d. 13Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- e. 14Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
- f. 15Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- g. 16Pemerintah Kabupaten Simalungun
- h. 17Pemerintah Kota Pematang Siantar
- i. 18Pemerintah Kabupaten Karo
- j. 19Pemerintah Kabupaten Dairi
- k. 20Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
- l. 21Pemerintah Kabupaten Samosir
- m. 22Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

- n. 23Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
- o. 24Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- p. 25Pemerintah Kota Sibolga
- q. 26Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- r. 27Pemerintah Kabupate Batu Bara
- s. 28Pemerintah Kota Tanjung Balai
- t. 29Pemerintah Kabupaten Asahan
- u. 30Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- v. 31Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
- w. 32Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- x. 33Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
- y. 34Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
- z. 35Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
- aa.36Pemerintah Kota Padangsidempuan
- bb.37Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
- cc. 38Pemerintah Kota Gunungsitoli
- dd.39Pemerintah Kabupaten Nias
- ee.40Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
- ff. 41Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- gg.42Pemerintah Kabupaten Nias Utara

#### B. CARA PENGGUNAAN POLA KLASIFIKASI ARSIP

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian kesatu, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.

Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian kesatu merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian 412.3. Selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412. 412 bagian dari 410 dan 410 bagian dari 400.

Disamping itu perlu diperhatikan kekhususan klasifikasi 400.

Contoh :

400	Kesra	(Perincian Kesatu)
410	Pembangunan Desa	(Perincian Kedua)
412	Perekonomian Desa	(Perincian Ketiga)
412.3	Koperasi Desa	(Perincian Keempat)
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)	(Perincian Kelima)

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah itu disajikan untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah. Pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.
3. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Contoh masalah Peraturan Daerah Provinsi dapat secara berturut-turut diberi kode:
  - a. 188.341 Peraturan Daerah Provinsi
  - b. 188.34 Peraturan Daerah
  - c. 188.3 Peraturan
  - d. 188 Peraturan Perundang-undangan
4. Untuk OPD/UPTD yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf b atau huruf c, yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.
5. Kode Pembantu  
Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.  
Contoh:

591	Tataguna Tanah
02	Kode Pembantu Penelitian
591.02	Penelitian Tataguna Tanah
045.4	Pembinaan Kearsipan
05	Kode Pembantu Panitia
045.405	Panitia Pembinaan Kearsipan
6. Menyusun Kode  
Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900. Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.



7. Apabila pada kode ada petunjuk “tambahan perincian” berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain
- Contoh I : Proyek Pasar
- 055 - Proyek Bidang Perekonomian
- 511.2 - Pasar
- 055.112 - Proyek Pembangunan Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

056 - Proyek Bidang P.U

630 - Jembatan

056.3 - Proyek Jembatan

Angka 0 paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan.

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu sama-sama benar.

Contoh :

- a. Peraturan Pemerintah tentang Pensiun bisa diklasifikasikan dengan kode :
- 188.31 Peraturan Pemerintah, atau
  - 882.08 Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun
- Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).
- b. Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian Pamong Desa). Masalahnya penghasilan pamong desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian isi sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh: Surat tentang “Persawahan untuk transmigrasi” dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.



## 10. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada di depan. Indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

### C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI

#### 1. Perincian pertama:

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan/Ketertiban
- 400 Kesejahteraan Rakyat
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

#### 2. Perincian kedua:

- 000 UMUM
  - 010 Urusan Dalam
  - 020 Peralatan
  - 030 Kekayaan Daerah
  - 040 Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
  - 050 Perencanaan
  - 060 Organisasi/Ketatalaksanaan
  - 070 Penelitian
  - 080 Konferensi/ Rapat/ Seminar
  - 090 Perjalanan Dinas
- 100 PEMERINTAHAN
  - 110 Pemerintahan Pusat
  - 120 Pemerintahan Provinsi
  - 130 Pemerintahan Kabupaten/Kota
  - 140 Pemerintahan Desa/Kelurahan
  - 150 Legislatif/MPR/ DPR/ DPD
  - 160 DPRD Provinsi
  - 170 DPRD Kabupaten/Kota
  - 180 Hukum
  - 190 Hubungan Luar Negeri
- 200 POLITIK
  - 210 Kepartaian
  - 220 Organisasi Kemasyarakatan
  - 230 Organisasi Profesi dan Fungsional
  - 240 Organisasi Pemuda
  - 250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan dan Angkutan
  - 260 Organisasi Wanita
  - 270 Pemilihan Umum
  - 280 Pengucapan Sumpah Janji DPR dan DPRD
- 300 KEAMANAN/KETERTIBAN
  - 310 Pertahanan
  - 320 Kemiliteran
  - 330 Keamanan
  - 340 Pertahanan Sipil
  - 350 Kejahatan

360	Bencana
370	Kecelakaan/ SAR
380	-
390	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
410	Pembangunan Desa
420	Pendidikan
430	Kebudayaan
440	Kesehatan
450	Agama
460	Sosial
470	Kependudukan
480	Media Massa
490	Pengaduan Masyarakat
500	PEREKONOMIAN
510	Perdagangan
520	Pertanian
530	Perindustrian
540	Pertambangan/ Kesamuderaan
550	Perhubungan
560	Tenaga Kerja
570	Permodalan
580	Perbankan/Moneter
590	Agraria
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
610	Pengairan
620	Jalan
630	Jembatan
640	Bangunan
650	Tata Kota
660	Tata Lingkungan
670	Ketenagaan
680	Peralatan
690	Air Minum
700	PENGAWASAN
710	Bidang Pemerintahan
720	Bidang Politik
730	Bidang Keamanan/Ketertiban
740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
750	Bidang Perekonomian
760	Bidang Pekerjaan Umum
770	-
780	Bidang Kepegawaian
790	Bidang Keuangan
800	KEPEGAWAIAN
810	Pengadaan
820	Mutasi
830	Kedudukan
840	Kesejahteraan
850	Cuti
860	Penilaian
870	Tata Usaha Kepegawaian
880	Pemberhentian Pegawai
890	Pendidikan Pegawai

900	KEUANGAN
910	Anggaran
920	Otoritasi/ SKO
930	Verifikasi
940	Pembukuan
950	Perbendaharaan
960	Pembinaan Kebendaharaan
970	Pendapatan
980	-
990	Bendaharawan

#### KLASIFIKASI RINCIAN LENGKAP KODE SURAT DINAS

Contoh Surat yang ditanda tangani oleh Gubernur dan atas nama Gubernur :

Nomor : .....\* .....\*\*  
 .....\* : Nomor kode urusan (klasifikasi)  
 .....\*\* : Nomor urut surat keluar dari Biro Umum

Contoh Surat yang ditanda tangani pimpinan OPD :

Nomor : .....\*/ .....\*\*/ .....\*\*\*/ .....\*\*\*\*/ .....\*\*\*\*\*  
 .....\* : Nomor kode urusan (klasifikasi)  
 .....\*\* : Nomor urut surat keluar  
 .....\*\*\* : Komponen/ Instansi  
 .....\*\*\*\* : Bulan (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII)  
 .....\*\*\*\*\* : Tahun

Contoh Penomoran Surat :

1. Surat Undangan Rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada SKPD.  
= 005/120/Bappeda/X/2017
2. Surat Pemberitahuan Penyerahan Arsip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.  
= 045.35/649/Budpar/VII/2017
3. Surat Perjalanan Dinas Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai (Bimtek, Sosialisasi, dll) Dinas Lingkungan Hidup  
=094/220/LH/IX/2017

#### 3. Perincian Ketiga :

- |     |                              |
|-----|------------------------------|
| 000 | UMUM                         |
| 001 | LAMBANG                      |
| .1  | Garuda                       |
| .2  | Bendera Kebangsaan           |
| .3  | Lagu Kebangsaan              |
| .4  | Daerah                       |
| .31 | Provinsi                     |
| .32 | Kabupaten                    |
| 002 | Tanda Kehormatan/Penghargaan |
| .1  | Bintang                      |
| .2  | Satyalencana                 |
| .3  | Samkarya Nugraha             |
| .4  | Monumen                      |
| .5  | Penghargaan Secara Adat      |
| .6  | Penghargaan lainnya          |

- 003 Hari Raya/Besar
  - .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
  - .2 Hari Raya Keagamaan
  - .3 Hari Ulang Tahun
  - .4 Hari-hari Besar Internasional
- 004 Ucapan
  - .1 Ucapan Terima Kasih
  - .2 Ucapan Selamat
  - .3 Ucapan Belasungkawa
  - .4 Ucapan Lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
  - .1 Pamong Praja
  - .2 Tanda Pengenal
  - .3 Pejabat lainnya
- 007 -
- 008 -
- 009 -
- 010 URUSAN DALAM
- 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik  
Pamong/Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
  - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
  - .2 Perabot Rumah Dinas
  - .3 Rumah Dinas Golongan 1
  - .4 Rumah Dinas Golongan 2
  - .5 Rumah Dinas Golongan 3
  - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
  - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/Guest House
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Telepon/Faximile/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
  - .1 Upacara Bendera
  - .2 Tata Tempat
  - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
  - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
  - .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat
  - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
- 020 PERALATAN
  - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis

- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 -
- 034 -
- 035 -
- 036 -
- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 041 Perpustakaan
  - .1 Umum
  - .2 Khusus
  - .3 Perguruan Tinggi
  - .4 Sekolah
  - .5 Keliling
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
  - .1 Pola Klasifikasi
  - .2 Penataan Berkas
  - .3 Penyusutan Arsip
    - .31 Jadwal Retensi Arsip
    - .32 Pemindahan Arsip
    - .33 Penilaian Arsip
    - .34 Pemusnahan Arsip
    - .35 Penyerahan Arsip
    - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
    - .37 Daftar Pencarian Arsip
  - .4 Pembinaan Kearsipan
    - .41 Bimbingan Teknis
    - .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
    - .6 Pengawetan/Fumigasi

- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data
- 049 Jaringan Komunikasi Data
- 050 PERENCANAAN
  - .1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / Repelita/ 8 Sukses
  - .2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - .3 Rencana Strategis
  - .4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  - .5 Rencana Kerja
  - .6 Perencanaan Lainnya
  - .11 Pelita Daerah
  - .12 Bantuan Pembangunan Daerah
  - .13 Bappeda
- 051 *Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini :  
Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051  
Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86*
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300 Pada 053  
Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Peincian 400 pada 054  
Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671
- 055 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055  
Contoh: Proyek Pasar 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056  
Contoh: Proyek Jembatan 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
  - .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)
  - .1 Susunan dan Tata Kerja
  - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah



- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Komputerisasi
- 069 Standar Pelayanan Minimal
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementerian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa
- 080 KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional Di Dalam Negeri
- 086 Internasional Di Luar Negeri
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi /Pejabat Eselon I
- 094 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah

- 096 Perjalanan Pejabat Eselon II
- 097 Perjalanan Pejabat Eselon II ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai Ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN
- 101 Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif
- 102 Hubungan Luar Negeri
- 102 GDN
- 103 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- 104 -
- 105 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden
- Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan
- .1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
- .2 Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato
- 112 Wakil Presiden
- Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah jabatan
- .1 Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR
- .2 Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/Pidato
- 113 Susunan Kabinet
- .1 Reshuffle
- .2 Penunjukan Menteri Ad Interim
- .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
- .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
- 115 Kementerian lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antar Kementerian
- 120 PEMERINTAH PROVINSI
- .04 Laporan daerah
- .042 Monografi tambahkan kode wilayah
- .1 Koordinasi
- .2 Instansi Tingkat Provinsi
- .21 Dinas Otonomi

- .22 Instansi Vertikal
- .23 Kerjasama antar Provinsi/Daerah
- 121 Gubernur, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 122 Wakil Gubernur meliputi: pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah, meliputi: pencalonan, pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi
  - .1 Muspida
  - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
  - .3 Forum Koordinasi lainnya
- 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
  - .1 Pembinaan/ Perubahan Nama Daerah : Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dsb.
  - .2 Pembentukan Wilayah
  - .3 Pemindahan Ibukota
  - .4 Perubahan batas wilayah
  - .5 Pemekaran wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah
- 129 -
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- 131 Bupati/ Walikota, Tambahkan Kode Wilayah meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb.
  - .1 Sambutan/pengarahan/amanat Bupati/ Walikota
- 132 Wakil Bupati/Walikota,Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,
  - .1 Sambutan/ pengarahan/ amanat Wakil Bupati/ Wakil Walikota
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
  - .1 Muspida
  - .2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional)
  - .3 Forum Koordinasi Lainnya
  - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota

- 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
  - .1 Pemindahan Ibukota
  - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
  - .3 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota
  - .4 Perubahan Batas Wilayah
  - .5 Pemekaran Wilayah
  - .6 Permasalahan Batas Wilayah
  - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
  - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/ Kota, Daerah, Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
  - .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat
  - .2 Pembentukan Kecamatan
  - .3 Pemekaran Kecamatan
  - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
  - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/ Kemantren
- 139 -
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 141 Pamong Desa, Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan/Perangkat Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Badan Permusyawaratan Desa/BPD
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
  - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
  - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
  - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
  - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
  - .5 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan
  - .6 Alih Status Desa/Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa  
Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
  - .1 Kepala Kelurahan
  - .2 Sekretaris Kelurahan
  - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
  - .1 Rukun Tetangga
  - .2 Rukun Warga
  - .3 Lingkungan/ Rukun Kampung

- 150    LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
- 151    Keanggotaan MPR
  - .1    Pencalonan
  - .2    Pemberhentian
  - .3    Recall
  - .4    Pelanggaran
- 152    Persidangan
- 153    Kesejahteraan
  - .1    Keuangan
  - .2    Penghargaan
- 154    Hak
- 155    Keanggotaan DPR Pencalonan, Pengangkatan
- 156    Persidangan, Dengar Pendapat/ Rapat Komisi Reses
- 157    Kesejahteraan
  - .1    Keuangan
  - .2    Penghargaan
- 158    Jawaban Pemerintah
- 159    Hak
- 160    DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 161    Keanggotaan
  - .1    Pencalonan
  - .2    Pengangkatan
  - .3    Pemberhentian
  - .4    Recall
  - .5    Meninggal
  - .6    Pelanggaran
- 162    Persidangan
  - .1    Reses
- 163    Kesejahteraan
  - .1    Keuangan
  - .2    Penghargaan
- 164    Hak
- 165    Sekretaris DPRD Provinsi
- 166    -
- 167    -
- 168    -
- 170    DPRD KABUPATEN/ KOTA TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 171    Keanggotaan
  - .1    Pencalonan
  - .2    Pengangkatan
  - .3    Pemberhentian
  - .4    Recall

- .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- 173 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 180 HUKUM
  - .1 Kontitusi
  - .11 Dasar Hukum
  - .12 Undang-Undang Dasar
  - .2 GBHN
  - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
  - .1 Tanah
  - .2 Rumah
  - .3 Utang/Piutang
  - .31 Gadai
  - .32 Hipotik
  - .4 Notariat
- 182 Pidana
  - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
  - Peradilan Agama Islam 451.6
  - Peradilan Perkara Tanah 593.71
  - .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
  - .1 Visa
  - .2 Passport
  - .3 Exit
  - .4 Reentry
  - .5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara
- 186 Kependudukan
- 187 Kejaksaan
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
  - .1 TAP MPR
  - .2 Undang-Undang Dasar



	.3	Peraturan
	.31	Peraturan Pemerintah
	.32	Peraturan Menteri
	.33	Peraturan Lembaga Non Departemen
	.34	Peraturan Daerah
	.341	Peraturan Provinsi
	.342	Peraturan Kabupaten/Kota
	.4	Keputusan
	.41	Presiden
	.42	Menteri
	.43	Lembaga Non Departemen
	.44	Gubernur
	.45	Bupati/Walikota
	.5	Instruksi
	.51	Presiden
	.52	Menteri
	.53	Lembaga Non Departemen
	.54	Gubernur
	.55	Bupati/Walikota
189		Hukum Adat
	.1	Tokoh Adat/Masyarakat
190		HUBUNGAN LUAR NEGERI
191		Perwakilan Asing
192		Tamu Negara
193		Kerjasama dengan Negara Asing
	.1	ASEAN
	.2	Bantuan Luar Negeri/ Hibah
194		Perwakilan R.I di Luar Negeri/ Hibah
195		PBB
196		Laporan Luar Negeri
197		Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
198		-
199		-
200		POLITIK
201		Kebijaksanaan Umum
202		Orde baru
203		Reformasi
204		-
205		-
206		-
210		KEPARTAIAN
211		Lambang partai

- 212 Kartu Tanda Anggota
- 213 Bantuan Keuangan Parpol
- 214 Pendirian Parpol
- 215 Pembubaran Parpol
- 216 Pembinaan Parpol
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 221 Berdasarkan perjuangan
  - .1 Perintis kemerdekaan
  - .2 Angkatan 45
  - .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
  - .1 PEPABRI
  - .2 PWRI/Pensiunan PNS/ Wredatama
- 223 Berdasarkan kerohanian
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Ikatan Dokter Indonesia
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis

247	-
248	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
256	-
257	-
258	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Persatuan Wanita Indonesia
263	Pemberdayaan Perempuan/ Wanita
264	Kongres Wanita
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
	.1 TPS
	.2 Kendaraan
	.3 Surat Suara
	.4 Kotak Suara
	.5 Dana
277	Pemungutan Suara/Perhitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
280	Pengucapan Sumpah Janji DPR, DPRD dan DPD
281	-
282	-
283	-

284	-
300	KEAMANAN/KETERTIBAN
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	-
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Perbatasan
315	-
316	-
317	-
320	KEMILITERAN
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI .1 AMD (ABRI Masuk Desa)
325	-
326	-
327	-
328	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian .1 Polisi Pamong Praja .2 Kamra .3 Kamling .4 Jaga Wana
332	Huru-Hara/Demonstrasi
333	Senjata Api Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-Surat Kaleng
337	Pengaduan
338	Himbauan/Larangan
339	Teroris

340	PERTAHANAN SIPIL
341	Perlindungan Sipil
342	-
343	-
344	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontak
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan, Pencurian
354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
357	Pemeriksaan/Perbuatan Cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
360	BENCANA
361	Gunung Berapi/Gempa
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
	.1 Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
367	-
368	-
370	KECELAKAAN/SAR
371	Darat
372	Udara
373	Laut
374	Sungai/Danau
375	-
376	-
377	-
380	-
381	-
382	-
383	-

390	-
391	-
392	-
393	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Keluarga Miskin
402	PNPM Mandiri Pedesaan
403	-
404	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong
	.1 Swadaya Gotong Royong
	.11 Penataan Gotong Royong
	.12 Gotong Royong Dinamis
	.13 Gotong Royong Statis
	.14 Pungutan
	.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
	.21 Pembinaan
	.22 Klasifikasi
	.23 Proyek
	.24 Musyawarah
	.3 Latihan Kerja Masyarakat
	.31 Kader Masyarakat
	.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
	.33 Pusat Latihan
	.34 Kursus-Kursus
	.35 Kurikulum/Sylabus
	.36 Keterampilan
	.37 Pramuka
	.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	.41 Program
	.42 Pembinaan Organisasi
	.43 Kegiatan
	.5 Penyuluhan
	.51 Publikasi
	.52 Peragaan
	.53 Sosio Drama
	.54 Siaran Pedesaan
	.55 Penyuluhan Lapangan
	.6 Kelembagaan Desa
	.61 Kelompok Tani
	.62 Rukun Tani
	.63 Subak
	.64 Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa
	.1 Produksi Desa
	.11 Pengolahan



- .12 Pemasaran
- .2 Keuangan Desa
  - .21 Perkreditan Desa
  - .22 Inventarisasi Data
  - .23 Perkembangan/Pelaksanaan
  - .24 Bantuan/Stimulans
  - .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
- .3 Koperasi Desa
  - .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
  - .32 Koperasi Usaha Desa
- .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
  - .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan
  - .42 Pengarahan
  - .43 Pusat
  - .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
  - .51 Pusat
  - .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
  - .61 Bantuan Langsung
  - .62 Bantuan Keserasian
  - .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
  - .1 Prasarana Desa
    - .11 Pembinaan
    - .12 Bimbingan Teknis
  - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
    - .21 Lokasi
    - .22 Diskusi
    - .23 Pelaksanaan
  - .3 Masyarakat Pradesa
    - .31 Pembinaan
    - .32 Penyuluhan
  - .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
    - .41 Rumah Sehat
    - .42 Proyek Perintis
    - .43 Pelaksanaan
    - .44 Pengembangan
    - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
  - .1 Tingkat Perkembangan Desa
    - .11 Jumlah Desa
    - .12 Pemekaran Desa
    - .13 Pembentukan Desa Baru
    - .14 Evaluasi
    - .15 Bagan
  - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)

- .21 Penyuluhan Program
- .22 Lokasi UDKP
- .23 Pelaksanaan
- .24 Bimbingan/Pembinaan
- .25 Evaluasi
  
- .3 Tata Desa
- .31 Inventarisasi
- .32 Penyusunan Pola Tata Desa
- .33 Aplikasi Tata Desa
- .34 Pemetaan
- .35 Pedoman Pelaksanaan
- .36 Evaluasi
  
- .4 Perlombaan Desa
- .41 Pedoman
- .42 Penilaian
- .43 Kejuaraan
- .44 Piagam
  
- 415 Koordinasi
  - .1 Sektor Khusus
  - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
  - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
  - .4 Kerjasama
  - .41 Luar Negeri (UNICEF)
  - .42 Perguruan Tinggi
  - .43 Kementerian/Lembaga Non Kementerian
- 416 -
- 417 -
- 418 -
  
- 420 PENDIDIKAN
- 421 Sekolah
  - .1 Pra Sekolah
  - .2 Sekolah Dasar
  - .3 Sekolah Menengah
  - .4 Sekolah Tinggi
  - .5 Sekolah Kejuruan
  - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
  
  - .7 Kegiatan Pelajar
  - .71 Reuni Darmawisata
  - .72 Pelajar Teladan
  - .73 Resimen Mahasiswa
  
  - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
  - .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
  - Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran,
  - .1 Pendaftaran Mapras, Perpeloncoan
  - .2 Tahun Pelajaran
  - .3 Hari Libur
  - .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
  - .5 Beasiswa

- 423 Metode Belajar
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi
  - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
  - .5 Kurikulum
  - .6 Karya Tulis
  - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor  
Klasifikasi Disini : Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
  - .1 Gedung
  - .11 Gedung Sekolah
  - .12 Kampus
  - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
  - .2 Buku
  - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
  - .1 Cabang Olah Raga
  - .2 Sarana
  - .21 Gedung Olah Raga
  - .22 Stadion
  - .23 Lapangan
  - .24 Kolam renang
  - .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini : PON, Porsade, Olimpiade, dsb
  - .4 KONI
- 427 Kepramukaan Meliputi : Organisasi Dan Kegiatan Remaja  
Klasifikasi Disini : Gelanggang Remaja
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
  - .1 Cabang Kesenian
  - .2 Sarana
  - .21 Gedung Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
  - .1 Museum
  - .2 Peninggalan Kuno
  - .21 Candi Termasuk Pemugaran
  - .22 Benda
- 433 Sejarah

- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 -
- 438 -
- 439 -
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
  - .1 Gizi
  - .2 Mata
  - .3 Jiwa
  - .4 Kanker
  - .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
  - .6 Perawatan
  - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
  - .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
  - .1 Pengadaan
  - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular
  - .1 Pencegahan
  - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
    - .21 Kusta
    - .22 Kelamin
    - .23 Frambosia
    - .24 TBC/AIDS/HIV
  - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
    - .31 Kholera
    - .32 Imunisasi
    - .33 Surveilense
    - .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
  - .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
    - .41 Malaria
    - .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
    - .43 Filaria
    - .44 Serangga
  - .5 Hygiene Sanitasi
    - .51 Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
    - .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
    - .53 Pestisida
- 444 Gizi
  - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
  - .2 Keracunan Makanan

- .3 Menu Makanan Rakyat
- .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
- .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
  
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS,  
PUSKESMAS Keliling, Poliklinik.
  
- 446 Tenaga Medis
  
- 448 Pengobatan Tradisional
  - .1 Pijat
  - .2 Tusuk Jarum
  - .3 Jamu Tradisional
  - .4 Dukun/Paranormal
  
- 450 AGAMA
- 451 Islam
  - .1 Peribadatan
    - .11 Sholat
    - .12 Zakat Fitrah
    - .13 Puasa
    - .14 MTQ
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama
  - .4 Pendidikan
    - .41 Tinggi
    - .42 Menengah
    - .43 Dasar
    - .44 Pondok Pesantren
    - .45 Gedung Sekolah
    - .46 Tenaga Pengajar
    - .47 Buku
    - .48 Dakwah
    - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
  - .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
  - .6 Peradilan
  - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
  - .8 Mazhab
  
- 452 Protestan
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Gerejani
  
- 453 Katolik
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Gerejani

- 454 Hindu
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Keagamaan
- 455 Budha
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
  - .1 ONH
  - .2 Manasik
- 457 -
- 458 -
- 458 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
  - .1 Cacat Mata
  - .2 Cacat Tubuh
  - .3 Cacat Mental
  - .4 Bisul/Tuli
- 462 Tuna Sosial
  - .1 Gelandangan
  - .2 Pengemis
  - .3 Tuna Susila
  - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga
  - .1 Anak Putus Sekolah
  - .2 Ibu Teladan
  - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
  - .1 Pahlawan Meliputi : Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.
  - .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi : Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis.
  - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
  - .1 Lanjut Usia
  - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
  - .1 Korban Bencana
  - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
  - .3 Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
  - .4 Panti Asuhan
  - .5 Panti Jompo

- 467 Bimbingan Sosial
  - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi : Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman.
- 468 PMI
- 469 Makam
  - .1 Umum
  - .2 Pahlawan
  - .3 Khusus Keluarga Raja
  - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Penduduk
  - .1 Identitas Penduduk
    - .11 Biodata
    - .12 Nomor Induk Kependudukan
    - .13 Kartu Tanda Penduduk
    - .14 Kartu Keluarga
    - .15 Advokasi Identitas Penduduk
  - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
    - .21 Perpindahan Penduduk WNI
    - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
    - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
    - .24 Daerah Terbelakang
    - .25 Bedol Desa
  - .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
    - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
    - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
    - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
    - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
  - .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
    - .41 Akibat Bencana Alam
    - .42 Akibat Kerusuhan Sosial
    - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
    - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
  - .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
    - .11 Kelahiran
    - .12 Kematian
    - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
  - .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
    - .21 Perkawinan Agama Islam
    - .22 Perkawinan Agama Non Islam
    - .23 Perceraian Agama Islam
    - .24 Perceraian Agama Non Islam
    - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian

- .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak  
Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi  
Pengangkatan Anak
- .31 Pengangkatan Anak
- .32 Pengakuan Anak
- .33 Pengesahan Anak
- .34 Perubahan Anak
- .35 Pembatalan Anak
- .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan  
Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan  
Akta.
  
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan
- .41 Akibat Perkawinan
- .42 Akibat Kelahiran
- .43 Non Perkawinan
- .44 Non Kelahiran
- .45 Perubahan WNI ke WNA
  
- 473 Informasi Kependudukan
  - .1 Teknologi Informasi
  - .11 Perangkat Keras
  - .12 Perangkat Lunak
  - .13 Jaringan Komunikasi Data
  
  - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
  - .21 Daerah Maju
  - .22 Daerah Berkembang
  - .23 Daerah Terbelakang
  
  - .3 Pengolahan Data Kependudukan
  - .31 Pendaftaran Penduduk
  - .32 Kejadian Vital Penduduk
  - .33 Penduduk Non Registrasi
  
  - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
  - .41 Media Elektronik
  - .42 Media Cetak
  - .43 Outlet
  
- 474 Perkembangan Penduduk
  - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
  - .11 Struktur Jumlah
  - .12 Komposisi
  - .13 Fertilitas
  - .14 Kesehatan Reproduksi
  - .15 Morbiditas Penduduk
  - .16 Mortalitas Penduduk
  
  - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
  - .21 Anak dan Remaja
  - .22 Penduduk Usia Produktif
  - .23 Penduduk Lanjut Usia
  - .24 Gender
  
  - .3 Penataan Persebaran Penduduk
  - .31 Migrasi Antar Wilayah



- .32 Migrasi Internasional
- .33 Urbanisasi
- .34 Sementara
- .35 Migrasi Non Permanen
  
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
  - .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
  - .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
  - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
  - .44 Partisipasi Masyarakat
  
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
  - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
  - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
  - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
  - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
  
- 475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
  - .1 Indikator Kependudukan
    - .11 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
    - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
    - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
  - .2 Proyeksi Kependudukan
    - .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
    - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
  - .3 Analisis Dampak Kependudukan
    - .31 Penyusunan Dan Pengembangan
    - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
  - .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
    - .41 Lembaga Internasioanal
    - .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
    - .43 Lembaga Usaha Swasta
  - .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
    - .51 Lembaga Pemerintah
    - .52 Pemerintah Provinsi dan Kota
    - .53 Pemerintah Kabupaten
  - .6 Analisis
  
- 476 Monitoring
  
- 477 Evaluasi
  
- 478 Dokumentasi
- 479 -
  
- 480 MEDIA MASSA
- 481 Penerbitan
  - .1 Surat Kabar
  - .2 Majalah
  - .3 Buku

- .4 Penerjemahan
- 482 Radio
  - .1 RRI
    - .11 Siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini
  - .2 Non RRI
  - .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
  - .1 Kewartawanan
  - .2 Wawancara
  - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
  - .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 -
- 492 -
- 500 PEREKONOMIAN
  - .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang  
*Klasifikasikan Masalahnya*
- 504 -
- 505 -
- 506 -
- 507 -
- 510 PERDAGANGAN
  - Klasifikasikan Disini : Tata Niaga
    - .1 Promosi Perdagangan
      - .11 Pekan Raya
      - .12 Iklan
      - .13 Pameran Non Komersil
    - .2 Pelelangan
    - .3 Tera

- 511 Pemasaran
  - .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah :  
Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng.
  - .2 Pasar
  - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan Koperasi untuk BUUD, KUD  
lihat (412.31-412.32)
- 518 -
- 519 -
- 520 Pertanian
- 521 Tanaman Pangan
  - .1 Program
    - .11 Bimas/Inmas Termasuk Kredit
    - .12 Penyuluhan
  - .2 Produksi
    - .21 Padi/Panen
    - .22 Palawija
    - .23 Jagung
    - .24 Ketela Pohon/Ubi-Ubian
    - .25 Hortikultura
    - .26 Sayuran/Buah-Buahan
    - .27 Tanaman Hias
    - .28 Pembudidayaan Rumpun Laut
  - .3 Sarana Usaha Pertanian
    - .31 Peralatan Meliputi : Traktor Dan Peralatan Lainnya
    - .33 Pembibitan
    - .34 Pupuk
  - .4 Perlindungan Tanaman
    - .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
    - .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan Sejenisnya.
    - .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pompa dan Pemberantasan melalui udara
    - .44 Pestisida
  - .5 Tanah Pertanian Pangan
    - .51 Persawahan
    - .52 Perladangan
    - .53 Kebun
    - .54 Rumpun Ikan Laut

- .55 Lahan Kritis
- .6 Pengusaha Petani
- .7 Bina Usaha
- .71 Pasca Panen
- .72 Pemasaran Hasil
- 522 Kehutanan
  - .1 Program
    - .11 Hak Pengusahaan Hutan
    - .12 Tata Guna Hutan
    - .13 Perpetaan Hutan
    - .14 Tumpangsari
  - .2 Produksi
    - .21 Kayu
    - .22 Non Kayu
  - .3 Sarana Usaha Kehutanan
  - .4 Penghijauan, Reboisasi
  - .5 Kelestarian
    - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
    - .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
    - .53 Kebun Binatang
    - .54 Konservasi Lahan
  - .6 Penyakit/Hama
  - .7 Jenis-jenis hutan
    - .71 Hutan hidup
    - .72 Hutan wisata
    - .73 Hutan Produksi
    - .74 Hutan lindung
- 523 Perikanan
  - .1 Program
    - .11 Penyuluhan
    - .12 Teknologi
  - .2 Produksi
    - .21 Pelelangan
  - .3 Usaha Perikanan
    - .31 Pembibitan
    - .32 Daerah Penangkapan
    - .33 Pertambakan Meliputi : (Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang, dll)
    - .34 Jaring Terapung
  - .4 Sarana
    - .41 Peralatan
    - .42 Kapal
    - .43 Pelabuhan
  - .5 Pengusaha

	.6 Nelayan
524	Peternakan
	.1 Produksi
	.11 Susu Ternak Rakyat
	.12 Telur
	.13 Daging
	.14 Kulit
	.2 Sarana Usaha Ternak
	.21 Pembibitan
	.22 Kandang Ternak
	.3 Kesehatan Hewan
	.31 Penyakit Hewan
	.32 Pos Kesehatan Hewan
	.33 Tesi Pullorum
	.34 Karantina
	.35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya
	.4 Perunggasan
	.5 Pengembangan Ternak
	.51 Inseminasi Buatan
	.52 Pembibitan/Bibit Unggul
	.53 Penyebaran Ternak
	.6 Makanan Ternak
	.7 Tempat Pemotongan Hewan
	.8 Data Peternakan
525	Perkebunan
	.1 Program
	.2 Produksi
	.21 Karet
	.22 Teh
	.23 Tembakau
	.24 Tebu
	.25 Cengkeh
	.26 Kopra
	.27 Kopi
	.28 Coklat
	.29 Aneka Tanaman
526	-
527	-
528	-
530	PERINDUSTRIAN
	.08 Undang-Undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin/Elektronik
533	Industri Kimia/Farmasi

- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/Minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
- 537 Aneka Kerajinan
- 538 Usaha Negara/BUMN
  - .1 Perjan
  - .2 Perum
  - .3 Persero/PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD
- 540 PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN
- 541 Minyak Bumi/Bensin
  - .1 Pengusahaan
- 542 Gas bumi
  - .1 Eksploitasi/ Pengeboran
  - .11 Kontrak Kerja
  - .2 Pengolahan, meliputi : Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
  - .1 Batu
  - .2 Aluminium, Boksit
  - .3 Besi termasuk Besi Tua
  - .4 Tembaga
  - .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
  - .1 Vulkanologi
  - .11 Pengawasan Gunung Berapi
  - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
  - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
  - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
  - .2 Angkutan Jalan Raya
  - .21 Perizinan
  - .22 Terminal
  - .23 Alat Angkutan

- .3 Angkutan Sungai
- .31 Perizinan
- .32 Terminal
- .33 Pelabuhan
  
- .4 Angkutan Danau
- .41 Perizinan
- .42 Terminal
  
- .5 Feri
- .51 Perizinan
- .52 Terminal
- .53 Pelabuhan
  
- .6 Perkereta Apian
  
- 552 Perhubungan Laut
  - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
  - .11 Kemanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
  - .12 Pelayaran Dalam Negeri
  - .13 Pelayaran Luar Negeri
  
  - .2 Perkapalan Alat Angkutan
  - .3 Pelabuhan
  - .4 Pengerukan
  - .5 Penjagaan Pantai
  
- 553 Perhubungan Udara
  - .1 Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara
  - .2 Pelabuhan Udara
  - .3 Alat Angkutan
  
- 554 Pos
  
- 555 Telekomunikasi
  - .1 Telepon
  - .2 Telegram
  - .3 Telex/SSB, Faximile
  - .4 Satelit, Internet
  - .5 Stasiun Bumi, Parabola
  - .6 Teknologi Informasi
  
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
  - .1 Obyek Kepariwisataaan
  - .2 Perhotelan
  - .3 Travel service
  - .4 Tempat Rekreasi
  
- 557 Meteorologi
  - .1 Ramalan Cuaca
  - .2 Curah Hujan
  - .3 Kemarau Panjang
  
- 558 -
- 559 -

560	TENAGA KERJA
	.1 Pengangguran
561	Upah
562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI
563	Latihan Kerja
564	Tenaga Kerja
	.1 Butsi
	.2 Padat Karya
565	Perselisihan Perburuhan
566	Keselamatan Kerja
567	Pemutusan Hubungan Kerja
568	Kesejahteraan Buruh
569	Tenaga Orang Asing
570	PERMODALAN
571	Modal Domestik
572	Modal Asing
573	Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Modal
574	Pasar Uang Dan Modal
575	Saham
576	Belanja Modal
577	Modal Daerah
580	PERBANKAN/MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas
586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara
589	Moneter



- 590 AGRARIA
- 591 Tataguna Tanah
  - .1 Pemetaan dan Pengukuran
  - .2 Perpetaan
  - .3 penyediaan Data
  - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
  - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
  - .1 Redistribusi
  - .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
  - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
  - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
  - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
  - .2 Ganti Rugi
  - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Tanah
  - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
  - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
  - .3 Bagi Hasil
  - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
  - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
  - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
  - .4 Gadai Tanah
  - .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
  - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
  - .43 Sengketa Gadai Tanah
  - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
  - .6 Pengembangan
  - .7 Yayasan Dana Landreform
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
  - .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
  - .1 Sewa Tanah
  - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus
  - .2 Hak Milik
  - .21 Perorangan
  - .22 Badan Hukum
  - .3 Hak Pakai
  - .31 Perorangan
  - .311 Warga Negara Indonesia
  - .312 Warga Negara Asing
  - .32 Badan Hukum
  - .321 Badan Hukum Indonesia
  - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing

	.33 Tanah Gedung-Gedung Negara
	.4 Guna Usaha
	.41 Perkebunan Besar
	.42 Perkebunan Rakyat
	.43 Peternakan
	.44 Perikanan
	.45 Kehutanan
	.5 Hak Guna Bangunan
	.51 Perorangan
	.52 Badan Hukum
	.53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
	.54 Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165
	.55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
	.6 Hak Pengelolaan
	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate
	.61 Real Estate
	.62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
	.7 Sengketa Tanah
	.71 Peradilan Perkara Tanah
	.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
	.81 Pencabutan Hak
	.82 Pembebasan Tanah
	.83 Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
	.1 Pengukuran/Pemetaan
	.11 Fotogrametri
	.12 Terristris
	.13 Triangulasi
	.14 Peralatan
	.2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)
	.3 Sertifikat
	.4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
595	Lahan Transmigrasi
	.1 Tataguna Tanah
	.2 Landreform
	.3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
	.4 Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
599	-
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi

- 602 Kontraktor Pemborong
  - .1 Tender
  - .2 Penunjukan
  - .3 Prakualifikasi
  - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
  - .32 Tanda Daftar Rekanan
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
  - .1 Tanah Dan Batu Seperti : Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb
  - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
  - .3 Besi Dan Logam Lainnya
  - .31 Besi Beton
  - .32 Besi Profil
  - .33 Paku
  - .34 Alumunium, Profil
  - .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til) Pengawet Kayu
  - .5 Semen
  - .6 Kayu
  - .7 Bahan Penutup Atap ( Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya)
  - .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci
  - .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya
- 605 Instalasi
  - .1 Instalasi Bangunan
  - .2 Instalasi Listrik
  - .3 Instalasi Air Sanitasi
  - .4 Instalasi Pengatur Udara
  - .5 Instalasi Akustik
  - .6 Instalasi Cahaya/Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
  - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
  - .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
  - .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/Panas
  - .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
  - .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive
  - .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
  - .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
- 607 -
- 608 -
- 609 -
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
  - .1 Bangunan Waduk
  - .11 Bendungan
  - .12 Tanggul

- .13 Pelimpahan Banjir
- .14 Menara Pengambilan
  
- .2 Bangunan Pengambilan
  - .21 Bendungan
  - .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
  - .23 Bendungan Dengan Pompa
  - .24 Pengambilan Bebas
  - .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
  - .26 Sumur Dengan Pompa
  - .27 Kantung Lumpur
  - .28 Slit Ekstrator
  - .29 Escape Channel
  
- .3 Bangunan Pembawa
  - .31 Saluran
    - .311 Saluran Induk
    - .312 Saluran Sekunder
    - .313 Suplesi
    - .314 Tersier
    - .315 Saluran Kwartir
    - .316 Saluran Pasangan
    - .317 Saluran Tertutup/Terowongan
  - .32 Bangunan
    - .321 Bangunan Bagi
    - .322 Bangunan Bagi Dan Sadap
    - .323 Bangunan Sadap
    - .324 Bangunan Check
    - .325 Bangunan Terjun
  - .33 Box Tersier
  - .34 Got Miring
  - .35 Talang
  - .36 Syphon
  - .37 Gorong-Gorong
  - .38 Pelimpah Samping
  
- .4 Bangunan Pembuang
  - .41 Saluran
    - .411 Saluran Pembuang Induk
    - .412 Saluran Pembuang Sekunder
    - .413 Saluran Tersier
  - .42 Bangunan
    - .421 Bangunan Outlet
    - .422 Bangunan Terjun
    - .423 Bangunan Penahan Banjir
  - .43 Gorong-Gorong Pembuang
  - .44 Talang Pembuang
  - .45 Syphon Pembuang
  
- .5 Bangunan Lainnya
  - .51 Jalan
    - .511 Jalan Inspeksi
    - .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
  - .52 Jembatan
    - .521 Jembatan Inspeksi
    - .522 Jembatan Hewan
  - .53 Tangga Cuci

- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Agro
  
- 612 Folder
  - .1 Tanggul Keliling
  - .11 Tanggul
  - .12 Bangunan Penutup Sungai
  - .13 Jembatan
  
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .21 Saluran
    - .211 Saluran Muka
    - .212 Saluran Pembawa Waduk
    - .213 Saluran Pembawa Sekunder
  - .22 Stasiun Pompa Pemasukan
  - .23 Bangunan Bagi
  - .24 Gorong-Gorong
  - .25 Syphon
  
  - .3 Bangunan Pembuang
  - .31 Stasiun Pompa Pembuang
  - .32 Saluran
    - .321 Saluran Pembuang Induk
    - .322 Saluran Pembuang Sekunder
  - .33 Pintu Air Pembuangan
  - .34 Gorong-Gorong Pembuangan
  - .35 Syphon Pembuangan
  
  - .4 Bangunan Lainnya
  - .41 Bangunan
    - .411 Bangunan Pengukur Air
    - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
    - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
    - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
  - .42 Rumah Petugas Aksplorasi
  
- 613 Pasang Surut
  - .1 Bangunan Pembawa
  - .11 Saluran
    - .111 Saluran Pembawa Induk
    - .112 Saluran Pembawa Sekunder
    - .113 Saluran Pembawa Tersier
    - .114 Saluran penyimpanan air
  - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
  
  - .2 Bangunan Pembuang
  - .21 Saluran
    - .211 Saluran Pembuang Induk
    - .212 Saluran Pembuang Sekunder
    - .213 Saluran Pembuang Tersier
    - .214 Saluran Pengumpul Air
  - .22 Bangunan Pintu Pembuang

- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Kolam Pasang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Lalu Lintas
- .322 Saluran Muka
- .33 Bangunan
- .331 Bangunan Penangkis Kotoran
- .332 Bangunan Pengukur Muka Air
- .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .34 Jalan
- .35 Jembatan
  
- 614 Pengendalian Sungai
  - .1 Bangunan Pengaman
  - .11 Tanggul Banjir
  - .12 Pintu Pengatur Banjir
  - .13 Klep Pengatur Banjir
  - .14 Tembok Pengaman Talud
  - .15 Krib
  - .16 Kantung Lumpur
  - .17 Check-Dam
  - .18 Syphon
  
  - .2 Saluran Pengaman
  - .21 Saluran Banjir
  - .22 Saluran Drainage
  - .23 Corepure
  
  - .3 Bangunan Lainnya
  - .31 Warning System
  - .32 Stasiun
  - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
  - .322 Stasiun Pengukur Air
  - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
  - .324 Stasiun Pos Penjagaan
  
- 615 Pengamanan Pantai
  - .1 Tanggul
  - .2 Krib
  - .3 Bangunan Lainnya
  
- 616 Air Tanah
  - .1 Stasiun Pompa
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .3 Bangunan Pembuang
  - .4 Bangunan Lainnya
  
- 617 -
- 618 -
- 619 -
  
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
  - .1 Daerah Penguasaan
  - .11 Tanah
  - .12 Tanaman
  - .13 Bangunan

.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gedung Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapis Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit Tanah
.52	Gorong-Gorong (Culvert)
.6	Buku Trotuir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.82	Tanaman
.83	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara

.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapis Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-Gorong (Culvert)
.53	Sub Drainage
.6	Trotoar
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
623	-
624	-
625	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan Pada Jalan Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara



.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jalan
.42	Pondasi Pilar
.43	Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang/Trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang air
.7	Bangunan/Pengaman
.71	Turap Penahan
.72	Bronjong
.73	-
.74	Kist Dam
.75	Corepure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah

- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jembatan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloan
- .54 Landasan
- .6 Bangunan Atas
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang/Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang Air
- .7 Bangunan Pengaman
- .71 Turap/Penahan
- .72 Bronjong
- .73 Stek Dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median

- 633 -
- 634 -
- 635 -
  
- 640 BANGUNAN
  - .1 Gedung Pengadilan
  - .2 Rumah Pejabat Negara
  - .3 Gedung DPR
  - .4 Gedung Balai Kota
  - .5 Penjara
  - .6 Perkantoran
  
- 642 Bangunan Pendidikan
  - .1 Taman Kanak-Kanak
  - .2 SD & Sekolah Menengah
  - .3 Perguruan Tinggi
  
- 643 Bangunan Rekreasi
  - .1 Bangunan Olahraga
  - .2 Gedung Kesenian
  - .3 Gedung Pemancar
  
- 644 Bangunan Perdagangan
  - .1 Pusat Perbelanjaan
  - .2 Gedung Perdagangan
  - .3 Bank
  - .4 Pekantoran
  
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
  - .1 MCK
  - .2 Gedung Parkir
  - .3 Rumah Sakit
  - .4 Gedung Telkom
  - .5 Terminal Angkutan Udara
  - .6 Terminal Angkutan Air
  - .7 Terminal Angkutan Darat
  - .8 Bangunan Keagamaan
  
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
  - .1 Monumen
  - .2 Candi
  - .3 Keraton
  - .4 Rumah Tradisional
  
- 647 Bangunan Industri
  
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
  - .1 Rumah Perkotaan
    - .11 Inti/Sederhana
    - .12 Sedang/Mewah
  - .2 Rumah Pedesaan
    - .21 Rumah Contoh
  - .3 Real Estate
  - .4 Bapetarum

- 649 Elemen Bangunan
  - .1 Pondasi
    - .11 Di Atas Tiang
  - .2 Dinding
    - .21 Penahan Beban
    - .22 Tidak Menahan Beban
  - .3 Atap
  - .4 Lantai/Langit-Langit
    - .41 Supended
    - .42 Solit
  - .5 Pintu/Jendela
    - .51 Pintu Harmonik
    - .52 Pintu Biasa
    - .53 Pintu Sorong
    - .54 Pintu Kayu
    - .55 Jendela Sorong
    - .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
  - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
  - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan
  - .1 Kepadatan Rendah
  - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
  - .1 Industri Berat
  - .2 Industri Ringan
  - .3 Industri Ringan (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi
  - .1 Public Garden
  - .2 Sport & Playing Fields
  - .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
  - .1 Jaringan Jalan
    - .11 Penerangan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
  - .1 Saluran Pengumpulan
  - .2 Instalasi Pengolahan
    - .21 Bangunan
      - .211 Bangunan Penyaringan
      - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/ Sampah
      - .213 Bagunan Pengendap

- 693 Instalasi Pengelolaan
  - .1 Bangunan Ukur
  - .2 Bangunan Aerasi
  - .3 Bangunan Pengendapan
  - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
  - .5 Bangunan Pengaduk
  - .6 Bangunan Saringan
  - .7 Perpompaan
  - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
  - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
    - .11 Menara
    - .12 Reservoir di Bawah Tanah
  - .2 Perpipaan
  - .3 Perpompaan
  - .4 Jembatan Pipa
  - .5 Syphon
  - .6 Hydran
    - .61 Hydran Umum
    - .62 Hydran Kebakaran
  - .7 Katup
    - .71 Katup Udara (Air Relief)
    - .72 Katup Pelepas (Blow Off)
  - .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -
- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri

- .214 Bangunan Pengering Lumpur
- .22 Unit Desinfektan
- .23 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - .1 Persampahan
  - .11 Bangunan Pengumpul
  - .12 Bangunan Pemusnahan
  - .2 Pengotoran Udara
  - .3 Pengotoran Air
  - .31 Air Buangan Industri Limbah
  - .4 Kegaduhan
  - .5 Kebersihan Kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN
  - .1 Persampahan
  - .2 Kebersihan Lingkungan
  - .3 Pencemaran
  - .31 Pencemaran Air
  - .32 Pencemaran Udara
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian
- 663 Daerah Permukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
  - .1 Jaringan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 670 KETENAGAAN
- 671 Listrik
  - .1 Kelistrikan
  - .11 Kelistrikan PLN
  - .12 Kelistrikan Non PLN
  - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
  - .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
  - .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
  - .23 PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
  - .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
  - .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
  - .26 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)

- .3 Transmisi Tenaga Listrik
- .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
- .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
  
- .4 Distribusi Tenaga Listrik
- .41 Gardu Distribusi
- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Jaringan Bawah Tanah
  
- .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
  
- 672 Tenaga Air
  
- 673 Tenaga Minyak
  
- 674 Tenaga Gas
  
- 675 Tenaga Matahari
  
- 676 Tenaga Nuklir
  
- 677 Tenaga Panas Bumi
  
- 678 Tenaga Uap
  
- 679 Tenaga Lainnya
  
- 680 PERALATAN
- 681 -
- 682 -
- 683 -
  
- 690 AIR MINUM
- 691 Intake
  - .1 Broncaptering
  - .2 Sumur
  - .3 Bendungan
  - .4 Saringan (screen)
  - .5 Pintu air
  - .6 Saluran Pembawa
  - .7 Alat Ukur
  - .8 Perpompaan
  
- 692 Transmisi Air Baku
  - .1 Perpipaan
  - .2 Katup Udara (Air Relief)
  - .3 Katup Penguras (Blow Off)
  - .4 Bak Pelepas Tekanan
  - .5 Jembatan Pipa
  - .6 Syphon

- 693 Instalasi Pengelolaan
  - .1 Bangunan Ukur
  - .2 Bangunan Aerasi
  - .3 Bangunan Pengendapan
  - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
  - .5 Bangunan Pengaduk
  - .6 Bangunan Saringan
  - .7 Perpompaaan
  - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
  - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
    - .11 Menara
    - .12 Reservoir di Bawah Tanah
  - .2 Perpipaan
  - .3 Perpompaaan
  - .4 Jembatan Pipa
  - .5 Syphon
  - .6 Hydran
    - .61 Hydran Umum
    - .62 Hydran Kebakaran
  - .7 Katup
    - .71 Katup Udara (Air Relief)
    - .72 Katup Pelepas (Blow Off)
  - .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -
- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri



720	BIDANG POLITIK
721	Bidang Kepartaian
722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh, Tani
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Perlindungan Masyarakat
734	Bidang Kemanan
735	Bidang Kejahatan
736	Bidang Bencana
737	Bidang Kecelakaan
738	-
739	-
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama
746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian
753	Bidang Perindustrian
754	Bidang Pertambangan/ Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan
769	Bidang Air Minum
770	-
771	-
772	-

780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Bidang Pengadaan Pegawai
782	Bidang Mutasi Pegawai
783	Bidang Kedudukan Pegawai
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
788	Bidang Pemberhentian Pegawai
789	Bidang Pendidikan Pegawai
790	BIDANG KEUANGAN
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Verifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Perbendaharaan
796	Bidang Pembina Kebendaharaan
797	Bidang Pendapatan
798	-
799	Bidang Bendaharaan
800	KEPEGAWAIAN
	Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian
	.1 Perencanaan
	.2 Penelitian
	.043 Pengaduan
	.05 Tim
	.07 Statistik
	.08 Peraturan Perundang-Undangan
810	PENGADAAN
	Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan
	Pengangkatan Calon Pegawai
811	Lamaran
	.1 Testing
	.2 Screening
	.3 Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
	.1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
	.2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
	.3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
	.4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
	.5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan Tenaga Lepas
	.1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
	.2 Pengangkatan Tenaga Harian
	.3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	-
816	-
817	-

- 820 MUTASI  
Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer
- 821 Pengangkatan
- .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
  - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
  - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
  - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
  - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
  - .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
  - .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan Menduduki Jabatan
  - .21 Pengangkatan Eselon I
  - .22 Pengangkatan Eselon II
  - .23 Pengangkatan Eselon III
  - .24 Pengangkatan Eselon IV
  - .25 Residen/ Pembantu Gubernur
  - .26 Wedana/ Pembantu Bupati
  - .27 Camat
  - .28 Lurah Administratif (Kepala Desa)
  - .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
- .1 Pegawai Golongan 1
  - .2 Pegawai Golongan 2
  - .3 Pegawai Golongan 3
  - .4 Pegawai Golongan 4
  - .5 Lolos Butuh
  - .6 Kurikulum dan Silabi
  - .7 Proposal (TOR)
- 825 Data sering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- .1 Dalam Negeri
  - .2 Luar Negeri
  - .3 Tunjangan Belajar
  - .4 Penempatan Kembali

- 827   Wajib Militer
  
- 828   Mutasi Dengan Instansi Lain
- 829   -
  
- 830   KEDUDUKAN  
       Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian  
       Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat
  
- 831   Perhitungan Masa Kerja
  
- 832   Penyesuaian Pangkat/Gaji
  - .1   Pegawai Golongan 1
  - .2   Pegawai Golongan 2
  - .3   Pegawai Golongan 3
  - .4   Pegawai Golongan 4
  
- 833   Penghargaan Ijazah/Penyesuaian
  
- 834   Jenjang Pangkat/Eselonering
- 835   -
- 836   -
- 837   -
  
- 840   KESEJAHTERAAN PEGAWAI  
       Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan,  
       Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial,  
       Rekreasi Dan Dispensasi.
  
- 841   Tunjangan
  - .1   Jabatan
  - .2   Kehormatan
  - .3   Kematian/Uang Duka
  - .4   Tunjangan Hari Raya
  - .5   Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
  - .6   Keluarga
  - .7   Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
  
- 842   Dana
  - .1   Taspen
  - .2   Kesehatan
  - .3   Asuransi
  
- 843   Perawatan Kesehatan
  - .1   Poliklinik
  - .2   Perawatan Dokter
  - .3   Obat-Obatan
  - .4   Keluarga Berencana
  
- 844   Koperasi/Distribusi
  - .1   Distribusi Pangan
  - .2   Distribusi Sandang
  - .3   Distribusi Papan
  
- 845   Perumahan/Tanah
  - .1   Perumahan Pegawai

- .2 Tanah Kapling
- .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
  - .1 Bantuan Kebakaran
  - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 -
- 848 -
- 849 -
- 850 CUTI  
Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Bersalin, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/ Umroh
- 856 Cuti Di Luar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN  
Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi
- 861 Penghargaan
  - .1 Bintang/Satyalencana/ Karya Satya
  - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
  - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
  - .4 Hadiah Berupa Uang
  - .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
  - .1 Teguran Peringatan
  - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
  - .3 Penurunan Pangkat
  - .4 Pemindahan

Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
- 863 Konduite, DP3/SKP, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
  - .1 Tingkat 1
  - .2 Tingkat 2
  - .3 Tingkat 3

- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri  
Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana,  
Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN  
Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat  
Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, Janji Dan Korps  
Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi  
.1 NIP  
.2 KARPEG  
.3 Legitiminasi/Tanda Pengenal  
.4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan  
.1 Tanggal Lahir  
.2 Penggantian Nama  
.3 Izin kepartaian Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai  
.1 Pelimpahan Wewenang  
.2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian  
.1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI  
Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan  
Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain,  
Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk  
Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat.
- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun  
.1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri  
Golongan 1  
.2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri  
Golongan 2

- .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3
- .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4
- .5 Pensiun Janda/Duda
- .6 Pensiun Yatim Piatu
- .7 Uang Muka Pensiun
  
- 883 Karena Meninggal
  - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
  
- 884 Alasan Lain
  
- 885 Uang Pesangon
  
- 886 Uang Tunggu
  
- 887 Untuk Sementara Waktu
  
- 888 Tidak Dengan Hormat
  
- 889 -
  
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI  
Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
  
- 891 Perencanaan
  - .1 Program
  - .2 Kurikulum dan Silabi
  - .3 Proposal ( TOR )
  
- 892 Pendidikan Regular/Kader
  - .1 IPDN/APDN
  - .2 Kursus-Kursus Reguler
  
- 893 Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler
  - .1 LEMHANAS
  - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Diklat PIM
  - .3 Kursus-Kursus/Penataran/ Bimbingan Teknis
  - .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
  - .5 Diklat Lainnya
  
- 894 Pendidikan Luar Negeri
  - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
  - .2 Non Gelar/Diploma
  
- 895 Metode
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
  - .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
  - .5 Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
  - .7 Penugasan

- .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
  - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
  - .1 Tahun Pelajaran
  - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
  - .3 STTP
  - .4 Penilaian Angka Kredit
  - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
  - .1 Tunjangan Belajar
  - .2 Asrama
  - .3 Uang Makan
  - .4 Uang Transport
  - .5 Uang Buku
  - .6 Uang Ujian
  - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
  - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
  - .1 Bantuan Sarana Belajar
  - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
  - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD/ APBD-P
- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum
- 906 Dana Alokasi Khusus  
Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat ke Daerah)
- 907 Dana BOS
- 908 Tunjangan Daerah
- 909 -
- 910 ANGGARAN
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
  - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)



915	Daftar Isian Poyek (DIP)
	.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
	.2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)/ DPA
	.3 Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
	.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
916	Revisi Anggaran
917	-
918	-
920	OTORISASI/SKO
921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
930	VERIFIKASI
931	SPM Rutin (daftar p8)
932	SPM Pembangunan (daftar p8)
933	Penerimaan (daftar p6. p7
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	Penata Usaha Keuangan
945	-
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
955	Spesimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
957	-
958	-
959	-
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-
965	-
966	-

970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan/ PNB
978	Bantuan
979	-
980	-
981	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP/SPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004